



RENCANA KERJA BAKORWIL MADIUN TAHUN 2015



BADAN KOORDINASI WILAYAH

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN

JL. PAHLAWAN NO.31 MADIUN

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Prioritas Renstra	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan	15
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	19
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	24
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2015.....	24
III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015.....	24
BAB IV PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2014	12
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun	16
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun	19
Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016	26

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan DAN Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jawa Timur, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja Bakorwil Madiun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Bakorwil Madiun yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Bakorwil Madiun tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bakorwil Madiun tahun 2015.

Dalam rangka itulah guna meningkatkan peran Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun perlu untuk membuat Rencana Kerja yang memuat rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2015.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Bakorwil Madiun dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur ;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;
11. Keputusan Kepala Bakorwil Madiun Nomor 52 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019.

I.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bakorwil Madiun Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Renja menjadi acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun dengan tetap memperhatikan RKPD
- b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bakorwil Madiun Tahun 2015.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2015.
- b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun tahun 2015 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2013, analisis kinerja pelayanan Bakorwil Madiun, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja Bakorwil Madiun tahun 2015.

BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Bakorwil Madiun Tahun 2015.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Prioritas Renstra

Perlu diketahui, bahwa Renja Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2014-2019, yang di dalamnya terdapat perbedaan sasaran, indikator kinerja, dan target dengan Renstra Tahun 2009-2014, sehingga evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2013 dilakukan untuk melihat pencapaian Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2009-2014.

Pelaksanaan Rencana Kerja Bakorwil Madiun tahun 2013 sampai dengan keadaan bulan Desember 2013 hampir seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp 6.547.836.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.221.615.777,00 atau 95,02%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp 1.493.766.000 terealisasi sebesar 92,50% atau Rp 1.381.750.894.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp 503.427.500 terealisasi sebesar 99,23% atau Rp 499.535.750.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur, dengan pagu Rp 50.642.500 terealisasi sebesar 85,12% atau Rp 43.106.200.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

In House/ On Job Training, dengan pagu Rp 194.153.500 terealisasi sebesar 88,56% atau Rp 171.943.400.

Hasil pelaksanaan :

Menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan kerjasama dalam mencapai tujuan agar kualitas sumber daya manusia meningkat dan profesional dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun.

Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan dalam kelas dan luar kelas, serta kegiatan pelatihan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing personal.

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan kantor
2. Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP)
3. Koordinasi, sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pagu Rp 1.225.100.500 terealisasi sebesar 96,50% atau Rp 1.182.281.937.

Hasil Pelaksanaan :

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan berupa kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana guna menunjang

lingkungan kerja yang representative termasuk perbaikan ringan dan berat gedung kantor dan rumah dinas, pembelian kursi rapat, AC, pembuatan tempat parkir dan pemeliharaan jaringan listrik, sedangkan kegiatan Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP) guna menghasilkan LAKIP dan SAKIP yang baik, serta koordinasi dan fasilitasi dalam rangka mendukung pengamanan tradisi nyekar menyambut Tahun Baru Islam 1435 H oleh ormas perguruan pencak silat se Bakorwil Madiun, kegiatan Hari Besar Keagamaan, dan Pemilukada di Kabupaten/Kota.

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan :

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, dengan pagu sebesar Rp 163.210.000 terealisasi 97,42% atau Rp 158.999.436.

Hasil Pelaksanaan :

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kegiatan Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja Bakorwil Madiun tahun 2013 dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memajukan Jawa Timur.

7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

Koordinasi, fasilitasi dan Pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil Madiun, dengan pagu sebesar Rp 76.100.000 terealisasi 87,19% atau Rp 66.350.663.

Hasil Pelaksanaan :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil Madiun. Hasil kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan keterampilan Banpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

8. Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual

Kegiatan :

1. Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Pasar Murah
3. Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana

Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual dengan pagu sebesar Rp 484.500.000 terealisasi 92,83% atau Rp 449.758.439.

Hasil Pelaksanaan :

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual berupa terlaksananya kegiatan rapat koordinasi, fasilitasi dan evaluasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yaitu terlaksananya koordinasi dan evaluasi Program Raskin tahun 2012 dan sosialisasi Program Raskin tahun 2013 se Bakorwil Madiun, koordinasi penanganan PMKS mobilitas tinggi wanita tuna susila se wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Jalin Kesra se Bakorwil Madiun sedangkan kegiatan pasar murah ditiadakan serta meningkatnya koordinasi dalam rangka kewaspadaan bencana di musim kemarau se wilayah Bakorwil Madiun yang melibatkan Badan/Dinas/Instansi terkait guna meminimalisir kerugian akibat terjadinya bencana akibat musim kemarau.

9. Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pemerintahan daerah
2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur
5. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan

6. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan dengan pagu Rp 1.560.000.000 terealisasi 95,65% atau Rp 1.492.160.988.

Hasil Pelaksanaan :

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan daerah berupa Fasilitasi diskusi publik lahirnya Pancasila dalam rangka meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan di wilayah Bakorwil Madiun dan koordinasi pembekalan kesiapan dan persiapan pekan KIM Jawa Timur VII-2013 Tingkat Bakorwil Madiun dan koordinasi dalam rangka persiapan dan kesiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 di wilayah Bakorwil Madiun.
2. Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah :
Terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan SIPD pada Kab/Kota se-Bakorwil Madiun tahun 2013, sinkronisasi dan evaluasi pendataan administrasi wilayah yang menyajikan data hasil penyelenggaraan pembangunan tahun 2013 pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil Madiun.
3. Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur :
Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan modal usaha dan penguatan kelembagaan Koperasi Wanita sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian se wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013, rapat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan pengadaan gabah/beras dalam negeri se Wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013, dan rapat koordinasi dan fasilitasi pengembangan system perbenihan dan pemasaran komoditas hortikultura khususnya sayuran se wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013.
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur:

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) se wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013, koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan kredit mikro dalam rangka penguatan modal UMKM se Bakorwil Madiun tahun 2013.

5. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan:

Terlaksananya Rapat koordinasi pengembangan Pariwisata melalui sinkronisasi kepariwisataan serta penguatan pendapatan asli daerah (PAD) se Bakorwil Madiun, koordinasi persiapan lomba implementasi budaya baca melalui uji cerdas siswa tingkat SLTA Tahun 2013 se Wilayah Bakorwil Madiun, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) se Wilayah Bakorwil Madiun dan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) se wilayah Bakorwil Madiun.

6. Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana :

Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka pemantapan HIPPA/GHIPPA di wilayah Bakorwil Madiun, koordinasi pemanfaatan dan pengamanan asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013, koordinasi persiapan penilaian program Adipura tahap I tahun 2013-2014 di wilayah Bakorwil Madiun dan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pertambangan (Penambangan Galian C) di wilayah DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo di wilayah Bakorwil Madiun.

10. Program Peningkatan Kerjasama

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Gedung Kantor
2. Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri
3. Identikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan.

Program Peningkatan Kerjasama dengan pagu sebesar Rp 796.936.000 terealisasi 97,34% atau Rp 775.728.070.

Hasil Pelaksanaan :

Berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan Program Peningkatan Kerjasama sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung Kantor :

Meningkatkan kualitas fisik bangunan gedung kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun berupa pemeliharaan ringan gedung dan bangunan dan belanja modal peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga.

2. Fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota, Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar Provinsi, Provinsi dengan Badan/Dinas/ Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri :

Terlaksananya rapat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan peningkatan penanaman modal (Investasi) daerah lintas batas se wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013 dan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan (Minapolitan) dan peternakan se-wilayah Bakorwil Madiun tahun 2013.

3. Identikasi, perencanaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan :

Terlaksananya rapat koordinasi Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur tahun 2013 Tingkat Bakorwil Madiun, rapat koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pemanfaatan jalan di Kab/Kota se Bakorwil Madiun tahun 2013.

Berikut ini adalah tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2013

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2014

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2014	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2014	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2014		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1											
1	20										
1	20	01									
1	20	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	% Pemenuhan honorarium pelaksana administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	01	099	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	02									
1	20	02	008	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	% Pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	02	099	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Pemenuhan dan pemeliharaan sarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah									
1	20	07	098	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update Pusat Data	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	20	17	220	In House/On Job Training	Jumlah pelatihan untuk pegawai	10	6	2	2	100%	2	10	100%
1	20	25		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah									
1	20	25	011	Rehabilitasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana lingkungan Kantor	% rehabilitasi sarana prasarana kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	25	029	Peningkatan Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Daerah (AKIP dan LAKIP)	Terlaksananya penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	25	034	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pemantuan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah	Jumlah koordinasi	10	6	2	2	100%	2	10	100%
1	20	28		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah									
1	20	28	055	Hari Jadi Propinsi Jawa Timur	Jumlah koordinasi	10	6	2	2	100%	2	10	100%
1	20	29		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
1	20	29	090	Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan Banpol PP di wilayah kerja Bakorwil Madiun	Jumlah pelatihan	5	3	1	1	100%	1	5	100%
1	20	40		Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Mental Spiritual									
1	20	40	013	Fasilitasi usaha kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah koordinasi	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	40	028	Pasar Murah	Jumlah koordinasi	5	3	1	1	100%	1	5	100%
1	20	40	176	Koordinasi dan Fasilitasi Penanganan Bencana	Jumlah koordinasi	5	3	1	1	100%	1	5	100%

1	20	45		Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama									
1	20	45	014	Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama	Jumlah koordinasi	4	2	1	1	100%	0	3	75%
1	20	54		Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
1	20	54	011	Gelar Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi	2	1	1	1	100%	0	2	100%
1	20	55		Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan									
1	20	55	001	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pemerintahan daerah	Jumlah koordinasi	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	55	004	Koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	Jumlah koordinasi	5	3	1	1	100%	1	5	100%
1	20	55	034	Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur	Jumlah koordinasi	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	55	040	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pengembangan UMKM di Jawa Timur	Jumlah koordinasi	5	3	1	1	100%	1	5	100%
1	20	55	041	Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	55	045	Fasilitasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	Jumlah koordinasi	15	9	3	3	100%	3	15	100%
1	20	64		Program Peningkatan Kerjasama									
1	20	64	022	Pemeliharaan Gedung Kantor	% pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	20	64	023	Fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/ Kota, antar Propinsi, Propinsi dengan Badan/Dinas/Instansi Sektoral serta kerja sama luar negeri	Jumlah koordinasi	10	6	2	2	100%	2	10	100%
1	20	64	024	Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan	Jumlah koordinasi	5	3	1	1	100%	1	5	100%

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur, maka gambaran pelayanan yang telah/akan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi sinkronisasi dan sinergitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Otonomi Provinsi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah;
2. Mendorong terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan otonomi pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah ;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah;
4. Memfasilitasi peningkatan program kerjasama dan penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan;
5. Membantu dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Instansi vertikal Departemen/Non Departemen di wilayah ;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) di wilayah yang terdiri dari Bakorwil Madiun, Korem 081 Madiun, Polres Madiun, serta Lanud Iswahyudi Magetan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis Bakorwil Madiun yaitu meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun, maka ditetapkan indikator kinerja serta target pencapaiannya sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun

No.	Indikator	Rencana Capaian Renstra	Target Renstra Tahun 2009-2014					Realisasi Capaian Renstra hingga Tahun 2013	Proyeksi Capaian hingga Tahun 2014	Catatan Analisis
			2010	2011	2012	2013	2014			
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(13)	(14)
1.	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum	13	2	2	3	2	4	9	13	
2.	Jumlah kordinasi pemerintahan dan pembangunan	193	38	38	39	38	40	153	193	

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Letak geografis kewilayahan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun berada di sebelah paling barat Provinsi Jawa Timur yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga berpotensi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat terutama pada daerah-daerah perbatasan, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagian besar topografi daerah di wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun merupakan pegunungan terjal dan tandus sehingga berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

Di samping itu masih terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerah rawan bencana, rawan peredaran narkoba dan rawan perkelahian antar perguruan beladiri dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun meletakkan isu-isu strategis sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu (5) lima tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun di Tahun 2014-2019 adalah :

1. Isu strategis pada Bidang Pemerintahan yang meliputi :
 - a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung
 - b. Masih adanya permasalahan batas wilayah
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah
 - d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi tahunan hari besar keagamaan (Suran Agung, halal bi halal, dsb)
 - e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat dan penegakan Perda
 - f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi maupun Luar Provinsi.
2. Isu strategis pada Bidang Kemasyarakatan yang meliputi :
 - a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin
 - b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angka kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan Pencegahan dari penularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS
 - c. Belum adanya Keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan perempuan
 - d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan
 - e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal, gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik
 - f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanya siswa putus sekolah (Wajar dikmen 12 tahun) dan masih adanya penduduk buta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah
 - g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN)
 - h. Belum efektifnya program Raskin terutama tepat sasaran (RTSM), tepat kuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.
3. Isu strategis pada Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi :
 - a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
 - b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi

- c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM dan bendungan
 - d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran air dan pengolahan limbah
 - e. Belum seimbangny Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
 - f. Ketidak serasian RTRW provinsi dan Kabupaten baik dari segi perencanaan dan aplikasinya
 - g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis
4. Isu strategis pada Bidang Pembangunan Ekonomi yang meliputi :
- a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing
 - b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian
 - c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan
 - d. Belum optimalnya penanganan permodalan Koperasi dan UMKM
 - e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah belum optimal
 - f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah
 - g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakat sekitar hutan
 - h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal
 - i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani)
 - j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan
5. Kurangnya penyediaan data dan informasi pendukung peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi :
- a. Belum optimalnya peran Badan Publik dan PPID dalam memberikan layanan informasi publik,
 - b. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi terutama dalam mendorong terwujudnya data sebagai sumber informasi masing-masing daerah
 - d. Peningkatan SDM aparatur dalam penerapan e-tata naskah

II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya perubahan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rencana kerja yang akan disusun. Setelah melalui analisis kebutuhan, diperoleh bahwa hasil analisis kebutuhan menunjukkan tidak ada perubahan yang diperlukan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rancangan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2015. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Madiun	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	80%	1.322.516.215	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Madiun	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	80%	1.322.516.215
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	1.322.516.215	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	1.322.516.215
			Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	93%				Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	93%	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	80%	628.587.117	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	80%	628.587.117
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	500	125.717.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	500	125.717.000

		Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	80%				Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	80%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	80%	213.576.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	80%	213.576.000
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia	15	125.717.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia	15	125.717.000
			Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD	80%				Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD	80%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	14	163.577.117	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Madiun	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	14	163.577.117
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	158.167.748	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	158.167.748
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	80%	70.000.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	80%	70.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	5	88.167.748	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	5	88.167.748
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60				Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	
			Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya	80%				Persentase pegawai yang mengikuti pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya	80%	
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan	Madiun	persentase dokumen penyelenggaraan	80%	126.666.666	Program Penyusunan, Pengendalian dan	Madiun	persentase dokumen penyelenggaraan	80%	126.666.666

	Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		pemerintahan yang disusun tepat waktu			Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		pemerintahan yang disusun tepat waktu		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Madiun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	54.666.666	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Madiun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	54.666.666
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Madiun	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	5	57.000.000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Madiun	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	5	57.000.000
Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun			3	Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun				3		
Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran			15	Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran				15		
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Madiun	Jumlah Update database SKPD	4	15.000.000	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Madiun	Jumlah Update database SKPD	4	15.000.000
			Jmlh SOP PDE yang ada	1				Jmlh SOP PDE yang ada	1	
5.	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	55%	3.143.619.048	Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	55%	3.143.619.048
	Koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	55%	875.000.000	Koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	55%	875.000.000
	Koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	55%	718.619.048	Koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitas, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	55%	718.619.048

	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	55%	750.000.000	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	55%	750.000.000
	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	55%	800.000.000	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Madiun	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	55%	800.000.000
6.	Program Pengembangan Data Informasi	Madiun	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	57%	529.714.286	Program Pengembangan Data Informasi	Madiun	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	57%	529.714.286
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	4	229.714.286	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	4	229.714.286
	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	Jumlah update database penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	4	100.000.000	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	Jumlah update database penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	4	100.000.000
	Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Madiun	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi PPID	4	200.000.000	Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Madiun	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi PPID	4	200.000.000

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bakorwil Madiun pada tahun 2015 belum melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Bakorwil Madiun.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bakorwil Madiun belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2015

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Bakorwil Madiun adalah :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun.
2. Meningkatkan dukungan keterisian data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bakorwil Madiun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Bakorwil Madiun adalah:

1. Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun
2. Meningkatnya dukungan keterisian data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dalam Renja Tahun 2015 terdapat program dan kegiatan yang telah disusun beserta tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan. Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya, antara lain:

1. Pencapaian baik visi dan misi Gubernur Jawa Timur maupun visi dan misi Bakorwil Madiun.

2. Peningkatan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun yang ditindaklanjuti.
3. Peningkatan keterisian data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
4. Peningkatan peran dan fasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	URUSAN WAJIB										
1	20		Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	Madiun	80%	1.322.516.215	APBD PROV		83%	1.362.071.805
1	20	01	001	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Madiun	80 %	1.322.516.215	APBD PROV	83 %	1.362.071.805
					Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Madiun	93%			93%	
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Madiun	80%	628.587.117	APBD PROV	83%	647.937.408
1	20	02	001	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Madiun	500	125.717.000	APBD PROV	500	129.987.044
					Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana SKPD	Madiun	80%			83%	
1	20	02	002	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Madiun	80%	213.576.000	APBD PROV	83%	220.830.221

1	20	02	003	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang tersedia	Madiun	15	125.717.000	APBD PROV		15	129.987.044
					Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan prasarana SKPD	Madiun	80%				83%	
1	20	02	004	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan prasarana yang terpelihara	Madiun	14	163.577.117	APBD PROV		14	167.133.099
1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian Sumber Daya Aparatur dengan kompetensi yang dibutuhkan	Madiun	80%	158.167.748	APBD PROV		83%	162.539.999
1	20	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	Madiun	80 %	70.000.000	APBD PROV		83 %	72.377.587
1	20	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Madiun	5	88.167.748	APBD PROV		5	90.162.412
					Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	Madiun	60				60	
					Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal/non-formal sesuai dengan jabatannya	Madiun	80%				83%	
1	20	11		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Madiun	80%	126.666.666	APBD PROV		83%	139.333.332
1	20	11	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	Madiun	4	54.666.666	APBD PROV		4	59.311.570

1	20	11	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Madiun	5	57.000.000	APBD PROV		5	61.724.157
					Jumlah dokumen evaluasi (Hasil Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan) yang tersusun	Madiun	3				3	
					Jumlah dokumen pelaporan keuangan/ anggaran	Madiun	15				15	
1	20	11	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update database SKPD	Madiun	4	15.000.000	APBD PROV		4	18.297.605
						Jumlah SOP PDE yang tersusun	Madiun			1		
1	20	96		Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Prosentase (%) jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Madiun	55%	3.143.619.048	APBD PROV		57%	3.457.980.953
1	20	96	001	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	Prosentase jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Madiun	55 %	875.000.000	APBD PROV		57 %	962.500.000
1	20	96	002	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Prosentase jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Madiun	55 %	718.619.048	APBD PROV		57 %	790.480.953
1	20	96	003	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Prosentase jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Madiun	55 %	750.000.000	APBD PROV		57 %	825.000.000
1	20	96	004	Koordinasi, faslitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Prosentase jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan	Madiun	55 %	800.000.000	APBD PROV		57 %	880.000.000

					prasarana yang ditindaklanjuti							
1	20	97		Program pengembangan Data Informasi	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	Madiun	57%	529.714.286	APBD PROV		59%	582.685.715
1	20	97	001	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi data administrasi wilayah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	4	229.714.286	APBD PROV		4	252.685.715
1	20	97	002	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	4	100.000.000	APBD PROV		4	110.000.000
1	20	97	003	Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi PPID	Madiun	4	200.000.00	APBD PROV		4	220.000.00

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bakorwil Madiun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015.

Demikian Renja Tahun 2015 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Madiun, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Madiun, 24 Juni 2014

KEPALA BAKORWIL MADIUN



SISWO HEROETOTO, SH,M.Hum,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19580227 198503 1 007